

Berikut pembahasan lengkap mengenai rangkuman materi PKN kelas 9 bab 5 yang membahas tentang Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia yang dirangkum dari buku paket BSE K13 revisi terbaru terbitan [kemdikbud](http://kemdikbud.go.id). Untuk melihat rangkuman bab lainnya, silahkan buka halaman [Rangkuman Materi PKN Kelas 9](#).

Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia

Keberagaman sosial masyarakat Indonesia melahirkan berbagai status sosial, mata pencaharian, kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dengan keberagaman, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sosial budaya yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Berikut contoh festival budaya nusantara sebagai wujud harmoni sosial budaya :



Perempuan memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti halnya laki-laki. Namun, jangan sampai kehilangan jati diri dan kodrat sebagai

perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki disebut kesetaraan gender.

Masalah sosial dikelompokkan menjadi 4 faktor

- 1. Ekonomi**, Tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan
- 2. Budaya**, Kebudayaan yang berkembang saat ini, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing memicu munculnya masalah sosial
- 3. Biologis**, menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan sebagainya. Ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi, sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit
- 4. Psikologis**, muncul jika psikologis masyarakat sangat lemah, jika beban hidup yang berat dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu menimbulkan luapan emosi yang dapat memicu konflik antar anggota masyarakat

C. Kluckhohn dalam bukunya *"Universal Categories of Cultures"*, adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal, permasalahannya terdapat pada :

- 1. Unsur sistem agama**, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan
- 2. Sistem masyarakat** dan organisasi kemasyarakatan
- 3. Sistem pengetahuan**, Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban
- 4. Bahasa**, merupakan suatu sistem bunyi dan jika digabungkan melalui aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu
- 5. Sistem mata pencaharian**, cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai

kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya

6. Sistem teknologi dan peralatan, merupakan sarana penunjang hidup manusia agar hidup lebih mudah

7. Kesenian, seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi

Sistem mata pencaharian disebut juga sistem ekonomi, yang terbagi atas beberapa bentuk, yaitu:

1. Berburu dan meramu
2. Menangkap ikan
3. Bercocok tanam di ladang
4. Bercocok tanam menetap
5. Peternakan
6. Perdagangan
7. Bidang jasa

Kemajuan teknologi berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas:

1. Alat-alat produktif
2. Alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi
3. Wadah atau tempat-tempat untuk menaruh barang kebutuhan
4. Makanan dan minuman
5. Pakaian dan perhiasan
6. Tempat berlindung dan perumahan
7. Senjata

Seni dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Seni rupa : seni lukis, seni patung, seni ukir
2. Seni sastra : puisi dan prosa
3. Seni pertunjukan : seni tari, seni drama/teater, seni musik

Fungsi seni adalah :

1. Sebagai hiburan bagi masyarakat
2. Untuk menentukan norma perilaku yang teratur

3. Menambah solidaritas masyarakat
4. Sebagai simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lainnya

Kondisi permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, inflasi, hutang luar negeri, defisit anggaran, ketidakmampuan industrial, ketidakmampuan sumber daya manusia, kurangnya penguasaan iptek, korupsi, masalah pangan, serta pembangunan yang cenderung tersentralisasi.

Permasalahan gender pada masyarakat Indonesia, berupa isu-isu umum yang berkaitan dengan gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, tradisi, adat istiadat, dan berbagai problematika dalam hubungan bermasyarakat.

Faktor penyebab permasalahan gender diantaranya, yaitu marginalisasi (peminggiran ekonomi), subordinasi (penomorduaan), beban kerja berlebih, cap-cap (stereotype) negatif, kekerasan berbasis kodrat perempuan.

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu membantu penyelamatan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk.

Membangun apresiasi terhadap penduduk lansia/veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.

Upaya penyelesaian masalah ekonomi : mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global, membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja, terutama keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan :

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi
2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya
3. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan

kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah

4. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah
5. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi terhadap perempuan
6. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
7. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi

Upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan :

1. Melalui jalur pendidikan, formal maupun informal
2. Terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan
3. Berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri
4. Memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Pesatnya arus informasi saat ini mengharuskan perempuan memanfaatkan potensi dirinya melalui pengembangan karir di luar rumah
5. Pelaksanaan pelatihan/pendidikan analisis gender, agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang gender, serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan program/perencanaan pembangunan
6. Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan

Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia harus melibatkan semua pihak. Baik secara individu, kelompok masyarakat dan pemerintah. Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk berupaya meningkatkan kualitas dan taraf hidup yang lebih baik.

Kelompok masyarakat perlu turut bekerja sama serta berpartisipasi mengatasi masalah sosial. Pemerintah melalui berbagai programnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Sumartini, A. T., Asep, S. P., Kokom, K., Ekram, P.P., Nasiwan & Dadang S. 2018.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs IX. Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.